



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

- Nama** : ITA ISDIANA ANWAR
- Jabatan** : KEPALA DINAS
- NHK** : 841094

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.500.000.000**

- Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BANTAENG, HASIL SENDIRI
Rp. 300.000.000
- Tanah Seluas 12300 m2 di KAB / KOTA BANTAENG, HASIL
SENDIRI Rp. 700.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 238 m2/168 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **200.000.000**

- MOBIL, NISSAN MARCH MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000
- MOBIL, MAZDA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **200.000.000**

D. SURAT BERTHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **3.410.710**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **5.903.410.710**

III. HUTANG **Rp.** **321.308.572**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **5.582.102.138**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.